

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian secara simultan (uji F), menunjukkan bahwa nilai $F = 0.000 < 0,05$. Sehingga jika Penyusunan perencanaan anggaran, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara positive dan signifikan meningkat, maka Penerapan *Good Corporate Governance* juga akan meningkat di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta.
2. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, menunjukkan bahwa variabel uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,358 menunjukkan bahwa variabel Penyusunan perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan *Good Corporate* hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,409 menunjukkan bahwa variabel Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*.
3. Berdasarkan dari hasil pengujian semua variabel yaitu Penyusunan perencanaan anggaran, dan Penyusunan LAKIP menjadi indikator dalam Penerapan *Good Corporate Governance*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika Penyusunan perencanaan anggaran yang dilakukan semakin baik dan efektif, maka semakin baik pula Penerapan *Good Corporate Governance* . begitu juga untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Dalam membuat Penyusunan perencanaan anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta sebaiknya lebih mengutamakan membuat program atau kegiatan yang lebih terukur dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Dalam implementasi LAKIP Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta sebaiknya digunakan sebagai pedoman merencanakan program untuk menerapkan *Good Corporate Governance* di Instansi Pemerintah.
3. Sebaiknya dilaksanakan revisi anggaran jika di dalam perencanaan Anggaran program Anggaran BNN Provinsi DKI Jakarta masih belum ada yang tepat sasaran.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel – variabel lain yang berpengaruh terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* instansi pemerintah dan bisa mengambil sampel yang lebih luas.